

# DINAMIKA BIROKRASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2018-2023

Ade Angel Lica Defit  
NPP 30.0324

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: [adeangellicadefit@gmail.com](mailto:adeangellicadefit@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr Muhadam Labolo, M. Si

## ABSTRACT

**Problem/Background:** We see the phenomenon of politicization of the bureaucracy in many political battles in Indonesia today. The problem of bureaucratic politicization is a problem in almost all regions in Indonesia. The bureaucracy is often involved in practical politics in the implementation of regional head elections. One of the political activities carried out by the bureaucracy was in the 2018 election process for the mayor and deputy mayor which took place in the city of Palembang. In this general election, the bureaucracy carries out its own dynamics in order to achieve optimal general election implementation. **Purpose:** This study aims to obtain an overview of the performance of the Empowerment Service. This study aims to find out and analyze the dynamics of bureaucracy in the election of the mayor of Palembang for the 2018-2023 period. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection used interview, observation and documentation techniques, then the validity of the data obtained by triangulation was carried out and using data analysis techniques with data reduction, data presentation which can then be drawn conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that there is adaptability in decisions related to elections and quick adaptation to an increasingly complex system. In terms of innovation, the bureaucracy developed the Si-Maspri mobile application. Flexibility is carried out by adjusting campaign and general election schedules with the COVID-19 pandemic situation. In terms of commitment, all parties have committed to carry out the elections for the Mayor of Palembang for the 2018-2023 period effectively and efficiently. In terms of responsiveness, the Palembang city bureaucracy responds quickly and appropriately to complaints, suggestions or input submitted by the public. For transparency, bureaucratic actors try to disclose information related to the election through the Election Commission website page. The last dynamic is collaboration with various parties, one of which is the customary leader. This is done in order to make the dynamics of the bureaucratic dynamics of the Palembang Mayor election for the 2018-2023 period run well. **Conclusion:** Based on this research, it can be concluded that the dynamics of bureaucracy in the election of the mayor of Palembang for the 2018-2023 period is very complex.

**Keywords:** Bureaucracy, General Election, Regional Head

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Fenomena politisasi birokrasi banyak kita lihat dalam pertarungan politik di Indonesia saat ini. Masalah politisasi birokrasi menjadi persoalan hampir diseluruh daerah di Indonesia. Birokrasi sering kali terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Salah satu kegiatan politik yang dilakukan birokrasi yakni ada pada proses pemilihan Walikota dan wakil walikota tahun 2018 yang berlangsung di Kota Palembang. Pada pemilihan umum ini, birokrasi menjalankan dinamika tersendiri dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan analisis bagaimana Dinamika birokrasi dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. **Metode:** Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan keabsahan data yang diperoleh dengan triangulasi serta menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya adaptabilitas dalam keputusan terkait pemilu serta cepat beradaptasi dengan sistem yang semakin kompleks. Dari segi Inovasi, birokrasi mengembangkan aplikasi mobile Si-Maspri. Fleksibilitas dilakukan dengan penyesuaian jadwal kampanye dan pemilihan umum dengan situasi pandemi COVID-19. Dari sisi komitmen seluruh pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023 secara efektif serta efisien. Dari sisi responsivitas, birokrasi kota Palembang merespons dengan cepat dan tepat terhadap keluhan, saran, atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk keterbukaan, pelaku birokrasi berusaha membuka informasi terkait pemilu melalui laman website milih KPU. Dinamika terakhir yakni kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, salah satunya ketua adat. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat laju dinamika birokrasi pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023 dapat berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian ini mampu disimpulkan bahwa dinamika birokrasi dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023 terjadi dengan sangat kompleks.

**Kata Kunci:** Birokrasi, Pemilihan Umum, Kepala Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena politisasi birokrasi banyak kita lihat dalam pertarungan politik di Indonesia, itu sudah menjadi rahasia umum bagi para politisi yang bertarung dalam perebutan sebuah kekuasaan. Masalah politisasi birokrasi menjadi persoalan hampir diseluruh daerah di Indonesia. Birokrasi sering kali terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Keterlibatan birokrasi dalam politik praktis ini dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah satu calon.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Proses pemilihan Walikota dan wakil walikota tahun 2018 yang berlangsung di Kota Palembang, membawa peran serta tokoh masyarakat lokal dalam pergulatan politik yang sedang menuju babak baru yakni politik identitas. Merespon kebijakan desentralisasi yang dewasa ini telah banyak diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia. Peran tokoh masyarakat tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai kalangan politik dan masyarakat besar yang ada di Indonesia guna sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap pemilihan umum yang digelar disetiap daerah.

Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di kota Palembang, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan di jatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal. Disisi lain, bagi tokoh budaya di Palembang selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental.

Keterlibatan tokoh Melayu dalam pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Palembang, merupakan tokoh melayu yang ada di Sumatera Selatan yang ikut melaksanakan Pemilu. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan diantara partai politik di kota Palembang, faktor adat dan tokoh lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Di era otonomi sekarang, tokoh lokal cukup berpengaruh kepada para pemilih. Tokoh masyarakat melayu merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.

Sesuatu hal yang tidak asing lagi bahwa dalam dunia politik apapun akan dilakukan yang tak lain dan tak bukan tujuan akhirnya adalah sebuah kepentingan individu hingga kekuasaan. Terlebih para elit politik pasti memiliki cara-cara tersendiri di *backstage* atau balik layar pameran untuk mewujudkan kepentingan dan kekuasaan yang dicapai yang kerap kali dilakukan tanpa memikirkan kepentingan dan keberlangsungan hidup orang banyak.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam konteks dinamika birokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Kota Palembang, terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan masyarakat terhadap birokrasi dengan realitas yang terjadi. Politisasi birokrasi menjadi sebuah isu yang merugikan akuntabilitas birokrasi terhadap masyarakat. Terdapat kecenderungan pejabat birokrasi yang terlibat dalam perebutan kekuasaan politik dengan memobilisasi bawahannya untuk menciptakan kekuatan politik yang besar. Hal ini mengakibatkan birokrasi kehilangan fokus pada tugas-tugas pelayanan publik dan meningkatkan risiko korupsi. Selain itu, terdapat perbedaan gambaran birokrasi antara pandangan masyarakat bawah dengan elit politik. Masyarakat bawah melihat birokrasi sebagai organisasi yang tidak efisien, berbelit-belit, dan korup, sehingga menghindari interaksi dengan birokrasi. Di sisi lain, elit politik memandang birokrasi sebagai alat untuk meraih kekuasaan, uang, dan jabatan. Kesenjangan ini mencerminkan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami dinamika birokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah berbasis pemilihan umum dengan praktik politik yang menciderai nilai-nilai demokrasi. Kesenjangan ini mencerminkan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami dinamika birokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan dampaknya terhadap proses demokrasi dan kepentingan masyarakat.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah kajian “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pemilu Serentak” oleh Fernanda (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman pemilih pemula terhadap teori, konsep, dan tujuan pemilihan kepala daerah serentak masih terbatas. Meskipun pemilihan kepala daerah serentak merupakan upaya pemerintah untuk menampung aspirasi warga negara, pemilih pemula memiliki harapan agar pelaksanaan pemilihan tersebut dapat berjalan lebih baik. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, termasuk remaja yang menjadi pemilih pemula. Selanjutnya kajian “Implementasi Pemilu Kepala Daerah Secara Serentak” oleh Kurniawan (2016) yang menunjukkan bahwa dalam konteks pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia, terdapat implikasi yang menyebabkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penyebab utamanya adalah adanya calon tunggal di suatu daerah, yang mengakibatkan penundaan pemilihan hingga tahap selanjutnya. Selama masa penundaan tersebut, Pelaksana Tugas (PLT) menggantikan peran Kepala Daerah, namun memiliki kewenangan yang terbatas. Lalu kajian “Dinamika Politik Pejabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 2020” oleh Widya Astuti (2021) yang menunjukkan bahwa proses pengusulan dan pergantian Prof. Yusran Yusuf memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak terlepas dari kepentingan politik. Karena tidak ada norma atau aturan yang mengatur, pergantian Pj walikota terjadi beberapa kali dalam satu periode hingga adanya kepala daerah definitif. Kemudian ada pula kajian “Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah” oleh Arsy Misda Julika (2021) yang menyatakan bahwa pertama, dalam UU Nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikarenakan faktor non-alam, yang dalam hal ini merujuk pada pandemi Covid-19. UU tersebut juga mencakup ketentuan mengenai pemilihan lanjutan atau susulan yang diatur oleh KPU. Kedua, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan dan penundaan pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Ketiga, analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya pemilihan kepala daerah tersebut, namun harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang berlaku. Terakhir penelitian dengan judul “Dinamika Demokrasi Desa (Studi Analisis Strategi Kandidat Pemenang Pilkades 2018 di Desa Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Siantar)” oleh Fatkhuliyah Rizqianah (2019) yang menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Tegalsari Barat belum mencapai tingkat kesehatan yang memadai karena masih terdapat praktik money politic dalam upaya mendapatkan dukungan suara. Setiap kandidat menggunakan strategi yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat. Sebagai contoh, Solihin, seorang kandidat pendatang baru, berhasil mengalahkan petahana dengan strategi yang menarik. Ia melakukan pendekatan dengan berbagai organisasi di Desa Tegalsari Barat, dan berhasil memperoleh dukungan suara yang signifikan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada dinamika birokrasi dalam pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023. Melalui penelitian ini, peneliti mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memahami dinamika pengusulan dan pergantian pejabat dalam konteks pemilihan kepala daerah. Terlebih lagi, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran politik dan kepentingan yang terlibat dalam proses pengusulan dan pergantian pejabat di level pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika birokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah, khususnya dalam kasus Walikota Palembang periode 2018-2023, dan memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang ini.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam dinamika birokrasi yang terlibat dalam pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023. Dalam konteks penelitian ini, dinamika birokrasi menjadi fokus utama untuk melihat interaksi antara aktor-aktor birokrasi, peran mereka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan tersebut.

### **II. METODE**

Desain atau Pendekatan penelitian menurut Nazir (2009:84) yaitu semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian. Sehubungan dengan itu maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Nazir(2009:54) menyebutkan bahwa Metode deskriptif merupakan sebuah metode yang meneliti suatu kerangka berpikir, suatu objek, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk itu penulis terjun langsung ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu tentang Bagaimana Birokrasi Terlibat dalam Pemilihan Walikota periode 2018-2023 di kota Palembang. Data dikumpulkan dalam dua bentuk yakni data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara terhadap 14 orang informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian disajikan, dianalisis, direduksi kemudian ditarik kesimpulan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan analisis dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan perspektif teoritis yaitu teori dinamika birokrasi dari Michael Crozier karena teori ini mampu menggambarkan dinamika birokrasi yang terjadi. Berdasarkan teori Michael Crozier ini, terdapat 7 indikator meliputi adaptabilitas, inovasi, fleksibilitas, komitmen, responsivitas, keterbukaan serta kolaborasi. Pada penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana dinamika birokrasi dalam pemilihan walikota Palembang Periode 2018-2023.

### 3.1 Dinamika Birokrasi Dalam Pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023

Dalam pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023, dinamika birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintahan yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dinamika birokrasi pada umumnya terkait dengan cara kerja dan interaksi antara para pegawai pemerintah dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan. Dinamika birokrasi dalam pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023 merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Peneliti pada bagian ini akan menganalisis bagaimana dinamika birokrasi dalam pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 dengan menggunakan teori dinamika birokrasi Michael Crozier. Michael Crozier menyatakan bahwa dalam suatu dinamika birokrasi, terdapat tujuh indikator yang mampu diamati, yakni adaptabilitas, inovasi, fleksibilitas, komitmen, responsivitas, keterbukaan serta kolaborasi.

**Tabel 1. Indikator Hasil dan Pembahasan**

<b>Dinamika Birokrasi Dalam Pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Hasil dan Pembahasan</b>
Adaptabilitas	Para pemegang kebijakan dalam proses Pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 dibebankan pada banyak hal, sehingga menuntut mereka untuk mampu beradaptasi dengan cepat dengan keadaan yang ada. Adapun bentuk adaptasi yang dilakukan yakni Birokrasi harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis, birokrasi harus mampu memperbarui proses dan sistem kerjanya agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi serta birokrasi mesti harus mampu mengubah budaya organisasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Adaptabilitas merupakan salah satu bentuk dinamika birokrasi yang penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Birokrasi yang adaptif pada Pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 telah mampu mengubah dan menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat terhadap perubahan dan tantangan tersebut, sehingga dapat menjaga kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
Inovasi	Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan dalam birokrasi Pemkot Palembang adalah penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Salah

	<p>satu contohnya adalah pengembangan aplikasi mobile "Si-Maspri" yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan di lingkungan sekitar mereka secara online. Pemkot Palembang juga mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis online yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan secara elektronik, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan. Melalui penggunaan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, pengoptimalan penggunaan sumber daya dan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat, Pemkot Palembang berhasil memperbaiki kinerja birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Di era digital seperti saat ini, inovasi dalam birokrasi dapat berupa penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>
<p>Fleksibilitas</p>	<p>Fleksibilitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023 merupakan momen penting dalam dinamika birokrasi kota Palembang, karena hasil dari pemilihan tersebut akan mempengaruhi arah dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kota selama lima tahun ke depan. Bentuk fleksibilitas dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023 adalah penyesuaian jadwal kampanye dan pemilihan umum dengan situasi pandemi COVID-19. Sebagai bentuk respons terhadap pandemi, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang melakukan beberapa penyesuaian dalam jadwal kampanye dan pemilihan umum agar tetap dapat berjalan dengan aman dan sehat bagi semua pihak. Pemilihan umum serentak yang semula direncanakan pada 23 September 2020, ditunda hingga 9 Desember 2020. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan KPU untuk mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, jadwal kampanye juga disesuaikan agar tidak menimbulkan kerumunan dan tetap</p>

	<p>memperhatikan protokol kesehatan. Kampanye dilakukan secara daring atau online dan diizinkan untuk dilakukan di lingkungan yang terbatas, seperti kantor partai politik atau rumah calon.</p>
Komitmen	<p>Pada pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023, komitmen menjadi sangat penting dalam menjaga keberhasilan program-program pembangunan dan kebijakan publik. Komitmen harus dimiliki oleh seluruh aparat birokrasi, baik dari tingkat pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan, untuk dapat memenuhi harapan masyarakat. Birokrasi kota Palembang harus dapat memastikan bahwa seluruh pegawai birokrasi bekerja secara profesional dan etis, serta terbebas dari praktek korupsi dan nepotisme. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi tegas kepada pegawai birokrasi yang terbukti melakukan pelanggaran etika atau hukum. Komitmen memungkinkan birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, mempertahankan integritas dan kredibilitas birokrasi, serta membangun kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penting bagi birokrasi kota Palembang untuk terus meningkatkan komitmen dan memastikan bahwa seluruh pegawai birokrasi memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.</p>
Responsivitas	<p>Responsivitas sangat penting dalam menjaga keberhasilan program-program pembangunan dan kebijakan publik pada pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. Dalam konteks pemilihan walikota, responsivitas menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan program-program pembangunan dan kebijakan publik karena masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dan birokrasi. Jika pemerintah dan birokrasi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka keberhasilan program-program pembangunan dan kebijakan publik dapat dijamin. Birokrasi kota Palembang harus dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap keluhan, saran, atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengaduan masyarakat, serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai birokrasi agar</p>



	<p>dapat merespons dengan lebih baik lagi. Dapat disimpulkan bahwa responsivitas merupakan salah satu bentuk dinamika birokrasi yang sangat penting dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. Responsivitas memungkinkan birokrasi untuk memberikan tanggapan atau solusi yang cepat dan tepat terhadap masalah atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kebijakan publik.</p>
Keterbukaan	<p>Pada pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023, keterbukaan diimplementasikan dengan cara membuka akses informasi yang mudah dan terbuka bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses informasi yang mudah, melalui berbagai media seperti situs web resmi, sosial media, atau publikasi melalui media massa. Selain itu, keterbukaan juga dapat diwujudkan melalui transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik. Birokrasi kota Palembang harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan publik diambil dengan transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut. Keterbukaan adalah salah satu bentuk dinamika birokrasi yang sangat penting dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. Keterbukaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperbaiki kualitas program dan kebijakan publik, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi kota Palembang harus memastikan bahwa seluruh program, kebijakan, dan keputusan publik diambil dengan transparan dan terbuka, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang mudah dan terbuka.</p>
Kolaborasi	<p>Kolaborasi adalah salah satu bentuk dinamika birokrasi yang sangat penting dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama antara birokrasi dan stakeholder lainnya dalam mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi antara birokrasi dan ketua adat dalam menentukan pilihan pemilih adalah salah satu bentuk dinamika birokrasi dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam</p>

	<p>proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar dan adil. Kolaborasi antara birokrasi dan ketua adat dalam menentukan pilihan pemilih adalah salah satu bentuk dinamika birokrasi yang penting dalam pemilihan walikota Palembang periode 2018-2023. Kolaborasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar dan adil, dan meningkatkan kualitas program pemerintah. Oleh karena itu, birokrasi dan ketua adat harus bekerja sama dengan. Kolaborasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pengembangan program. Dengan cara ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang berharga bagi birokrasi dalam menentukan kebijakan publik yang lebih baik. Kolaborasi juga dapat memperkuat hubungan antara birokrasi dan stakeholder lainnya. Dengan cara ini, birokrasi dapat membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan antara birokrasi dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program dan kebijakan publik.</p>
--	---

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam pemilihan Walikota Palembang periode 2018-2023, dinamika birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintahan yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Penelitian ini menganalisis dinamika birokrasi dalam pemilihan tersebut dengan menggunakan tujuh indikator yang diusulkan oleh Michael Crozier, yaitu adaptabilitas, inovasi, fleksibilitas, komitmen, responsivitas, keterbukaan, dan kolaborasi.

Dalam konteks adaptabilitas, para pemegang kebijakan dalam pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Hal ini melibatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan perubahan sistem kerja yang relevan dengan lingkungan yang berubah. Selain itu, budaya organisasi juga perlu diubah agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Birokrasi yang adaptif dapat menjaga kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan berkualitas.

Dalam aspek inovasi, Pemkot Palembang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Contohnya adalah pengembangan aplikasi mobile "Si-Maspri" yang memungkinkan masyarakat melaporkan permasalahan secara online. Pemkot Palembang juga mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis online untuk mempercepat proses pelayanan. Inovasi ini memungkinkan peningkatan kinerja birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas dalam dinamika birokrasi pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 terlihat dalam penyesuaian jadwal kampanye dan pemilihan umum dengan situasi pandemi COVID-19.

Pemilihan umum ditunda untuk memberikan waktu persiapan protokol kesehatan yang ketat. Kampanye dilakukan secara daring dan terbatas untuk menghindari kerumunan. Fleksibilitas ini memungkinkan birokrasi untuk tetap berjalan dengan aman dan sehat di tengah tantangan pandemi.

Komitmen merupakan faktor kunci dalam menjaga keberhasilan program-program pembangunan dan kebijakan publik. Birokrasi kota Palembang harus memastikan pegawai bekerja secara profesional dan etis, serta terbebas dari praktek korupsi dan nepotisme. Melalui sanksi tegas, birokrasi dapat mempertahankan integritas dan kredibilitasnya, serta membangun kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait. Responsivitas menjadi penting dalam pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 untuk menjaga keberhasilan program-program pembangunan dan kebijakan publik. Birokrasi harus merespons dengan cepat dan tepat terhadap keluhan, saran, atau masukan masyarakat.

Pada aspek keterbukaan, pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Birokrasi perlu menjaga integritas dan menghindari praktek-praktek korupsi. Dalam pemilihan tersebut, Pemkot Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip good governance, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi publik. Kolaborasi adalah faktor penting dalam dinamika birokrasi pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023. Birokrasi perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Melalui kolaborasi yang baik, program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dinamika birokrasi dalam pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan adaptabilitas, inovasi, fleksibilitas, komitmen, responsivitas, keterbukaan, dan kolaborasi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapakesimpulan pada sejumlah aspek yaitu, *adaptabilitas* dilakukan dengan membuat keputusan terkait pemilu serta cepat beradaptasi dengan sistem yang semakin kompleks. Dari segi *Inovasi*, birokrasi mengembangkan aplikasi mobile "Si-Maspri" yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan di lingkungan sekitar mereka secara online, salah satunya yakni permasalahan terkait pemilihan walikota. *Fleksibilitas* dilakukan dengan penyesuaian jadwal kampanye dan pemilihan umum dengan situasi pandemi COVID-19. Dari sisi *komitmen* seluruh pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan Walikota Palembang secara efektif serta efisien. Dari sisi *responsivitas*, birokrasi kota Palembang merespons dengan cepat dan tepat terhadap keluhan, saran, atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk *keterbukaan*, pelaku birokrasi berusaha membuka informasi terkait pemilu melalui laman website milih KPU. Dan terakhir, dinamika birokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah pemilihan walikota Palembang terlihat dari segi *kolaborasi* dengan berbagai pihak, salah satunya ketua adat. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat laju dinamika birokrasi pemilihan Walikota Palembang berjalan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dalam proses dokumentasi tidak mendapatkan semua apa yang tertera di tiap indikator.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Dinamika Birokrasi dalam pemilihan Walikota Palembang Periode 2018-2023 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A. (1984). *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustoni, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, 2010.
- Budi Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, teori dan proses*. Jogjakarta
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chalik, D. A. (1950). *Pertarungan Elite Politik Lokal*.
- Duverger, M. (1984). *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*.
- Haryanto. (2009). *Elite, Massa, dan Kekuasaan*.
- Lasswell, H. (1972). *Who Gets What, When, and How*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, A., Erwan, & Sulistyawati, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-Masalah Sosial*. Jogjakarta.
- Purwoko, B. (2005). *Demokrasi Mencari Bentuk*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Prabowo, A. W., & Suharyadi, E. (2019). Analisis Dinamika Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 16(1), 14-24.
- Prasetya, E. Y., & Soetjipto, B. E. (2019). Dinamika Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 4(2), 147-160.
- Wardhani, A. K. (2019). Dinamika Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 1-10.